

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Muin Fahmal, 2006, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintah*, hal 12.
- Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaruan, hal 39.
- Agus Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Governance melalui Good governance*, hal, 57.
- Agus Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik*, Gajahmada University Pres, hal 34.
- Agus Dwiyanto, 2012, *Manajemen Payanan Publik, Peduli Inklusif, dan Kualitatif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal 77.
- Albi Anggito, 2018, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hal 31.
- Aminudin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal*, hal 51.
- Ateng Syafrudin. 1995, *Butir-Butir bahan telahan tentang asas-asas umum pemerintahan yang layak untuk Indonesia, dalam Paulus Efendi Lotulung, himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Citra Aditiya bakti, Bandung, hal 132.
- Azhary, Muhammad Tahir, 1992, *Konsep socialist dan legality*, hal 27.
- Azhary, Muhammad Tahir, 1992, *Socialst dan legality*, hal 34.
- Bintoro Tjokoamidjojo, 2002, *Keberhasilan Indikator Good Governance*, hal 55.
- Budi Setiyono, 2007, *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*, Penerbit Kalam Nusantara, Jakarta, hal 42.
- Dadang Julianta. 2005, *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta, hal 81.
- Dadang Juliantara ED, 2005, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaruan, hal 78.
- Dedy Supriyadi, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, hal 72.
- Dr. Hardiyansyah, M.Si, 2011, *Kualitas Pelayanan publik*, hal 11.
- Dunn, Wiliam N, 2000, *Analisis Kebijakan Publik, Terjemah Samodra Wibawa*. Yogyakarta, Gajahmada University Press, hal 52.
- Dwiyanto, 2019, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada Univercity press, hal 62.

- Dzazuli, 2010, *Kaidah fiqih yang berkaitan dengan pelayanan publik*, hal 21.
- Fakhry Zamzam, 2015, *Good Governance Sekretariat Daerah*, hal 23.
- Firdasus Abdullah, 2010, *Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu*, hal 9.
- George Frederickson, 1987, *Administrasi Negara Baru*, Jakarta, LP3ES, hal 17.
- Gore dalam Sahya Anggara. 2012, *Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya menciptakan Good Governanc.*, Pustaka Setia, Bandung, hal 41.
- H.A. Moenir, 2008, *Manajemen Pelayanan Umum*, hal 32.
- Hadadi Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal 105.
- Hadjon Philipus M, 1987, *Konsep Indonesia*, hal 62.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Instrumen Hukum*, hal 13.
- Hadjon, philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, hal 31.
- Haryanto, 2004, *Menyelenggarakan pemerintah yang baik*, hal 21.
- Hessel Nogi S, 2005, *Kualitas Pelayanan Birokrasi*, hal 5.
- Hetifah Sj Sumarto, 2004, *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*, hal 52.
- Hikam, AS, 2000, *Otonomi Daerah dan Peran Masyarakat Lokal*, hal 41.
- I Nyoman Sumaryadi, 2016, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik*, hal 42.
- I Wayan Gede Suacana, 2020, *Model Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*, hal 62.
- Irfan Setiawan, 2018, *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*, hal 42.
- Joko Widodo, 2007, *Good goverment, telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era desentralisasi dan otonom daerah*. Surabaya, Meditama, hal 41.
- Kamaruddin Sellang, 2019, *Strategi dalam peningkatan Pelayanan Publik*, hal 32.
- Kansil, C.S.T, 1993, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara, hal 62.
- Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta, Pembaruan, hal 51.

- La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, hal 82.
- Lely Indah Mindarti, 2016, *Manajemen Pelayanan Publik*, Jakarta, UB Press, hal 132.
- Lely Indah Mindarti, 2016, *Pelayanan Publik menuju tata kelola yang baik*, hal 52.
- Lukman Sampara, 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: STIA LAN Press, hal 51.
- Lunshof, H. R. 1989, *Perkembangan negara hukum*, hal 68.
- M. Ismail, 2010, *Pelayanan Prima, Konsep dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik*, hal 49.
- M. Ryass Rasyid dkk. 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 57.
- Muhammad Tahir Azhari, 2015, *Beberapa aspek tata hukum negara*. Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, hal 84.
- Nurmah Semil, 2018, *Pelayanan Prima sektor Publik*, hal 39.
- Nurul Qamar, 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*, hal 105.
- Patricia Patton, EQ, 1998, *Pelayanan Sepenuh Hati, terjemah Hermes*. Jakarta, Pustaka Delapatra, hal 51.
- Paulus Efendi Lotulung, 1993, *Beberapa sistem kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 51.
- Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 84.
- Prdja, 1998, *Prinsip esensial syariat islam*, hal 90.
- Ratminto, 2007, *Menejemen Pelayanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 67.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Politik, Kekuasaan dan Hukum*, Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal 19.
- Sadu Wasistiono, 2002, *Kapita Selekta penyelenggaraan Pemenrintahan Daerah*. Bandung, Fokusmedia, hal 28.
- Saebani, 2008, *Maqa'idus syar'iyah dalam islam*, hal 7.
- Sampara Lukmana, 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta, SETIA LAN Press, hal 21.
- Sedarmanti, 2007, *Prinsip-prinsip Good Government*, hal 31.

- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance dalam rangka Otonomi daerah*, hal 42.
- Soedarmayanti. 2003, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka Otonomi Daerah*, Upaya membangun Organisasi Efektif dan Efesien melalui keronstruksi dan pemberdayaan, Mandarmaju, Bandung, hal 39.
- Soejito, Irawan. 1984, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemenrintah Daerah*. Jakarta, Bina Aksara, hal 52.
- Soerjono Soekarno dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindopersada, Jakarta, hal 5.
- Soetanto Soepinadhy, 2010, *Hukum Administrasi dan Desentralisasi*, Surabaya, hal 50.
- Sri Retno Wahyuningsih, 2010, *Pelayanan Perizinan Penanaman Modal*, hal 62.
- STIA LAN, 2000, *Kualitas Pelayanan Publik*, Jakarta, Press, hal 34.
- Sudarmayanti, 2007, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik atau tatakelola Perusahaan yang baik)*, hal 21.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*, Bandung, Alfabeta, hal 5.
- Sulaiman Asang, 2019, *Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas*, hal 80.
- Sumarto, Hetifah Sj, 2009, *Good Governance Menurut World Bank*, hal 21.
- Sumitro Djojokusumo, 2018, *Pendekatan Penelitian Sosiologi*, hal 33.
- Supriyadi, 2010, *Beberapa asas syariat islam*, hal 32
- Syarief Hidayat, 2008, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Prespektif State-Society Relation*, *Jurnal POELITIK*, hal 17.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, dkk, 2004, *Good governance-Kebijakan Publik*. Jakarta, JURNAL STIA Lembaga Administrasi Negara, hal 22.
- Tjokroamidjojo, 2003, *Filosofi kepemimpinan yang baik*, Bintoro, hal 51.
- Wahayono, 1992, *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta, Ind-Hill Co, hal 69.
- Wayne person dalam Yogi Suprayogi Sugandi, 2011, *Administrasi Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 58.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara.

Dalam UU No 25 Tahun 2010 pelayanan publik di teruskan atas dasar kriteria antar lain karakteristik penyediaan, sumber pembiayaan, ukuran besar biaya, dan luas jaringan kriteria tersebut sangat rancu dan dapat menyesatkan para pembentuk UU tersebut tampaknya masih amat dipengaruhi pemahaman pelayanan publik sebagai pelayanan pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

### **Al Qur'an**

Surat Al-Baqarah [2:267]